

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Choirunisah, 2008). Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Menurut PP No. 24 Tahun 2005 pelaporan keuangan sektor publik hendaknya memenuhi beberapa unsur, antara lain: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, dan (d) dapat dipahami (Indriasari dan Ertambang, 2007).

Hilmi dan Ali (2006) menyatakan bahwa ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi, agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pembuatan keputusan. Profesi akuntansi pun mengakui akan kebutuhan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dalam pekerjaan akuntan yang selalu berusaha untuk tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan.

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka

pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan (Harahap, S.S, 1993: 128).

Penggunaan teknologi informasi dalam sektor publik menjadikan organisasi sektor publik membentuk departemen sistem informasi. Para pengguna teknologi informasi berharap departemen sistem informasi membantu mereka dalam berbagai hal berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, misalnya pemilihan *hardware* dan *software*, instalasi sistem, pemecahan masalah, sambungan jaringan, pengembangan sistem dan pelatihan. Perluasan tanggungjawab ini terlihat pada berbagai bentuk fasilitas seperti pusat informasi dan bantuan. Suatu departemen sistem informasi yang sukses harus mampu memberikan keuntungan bagi para pengguna jasa melalui aktivitas-aktivitas pelayanan yang dilakukannya dan membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain departemen sistem informasi haruslah efektif bagi organisasi yang terlihat dari kepuasan para pengguna sistem informasi (Mulyadi, 2001: 21).

Sugijanto (2002) dalam Indriasari dan Ertambang (2007) menyatakan bahwa hal pertama yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti diketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume

transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Wilkinson et al., 2000). Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003), namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah, jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal (Indriasari dan Ertambang, 2007).

Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk

memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007). Hal-hal yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi (Sugijanto, 2002:50-66).

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administratif (Moscove et al., 1990 dalam Indriasari dan Ertambang, 2007). Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi antara

lain (Mahmudi, 2007): (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas.

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan (*timeliness*). Keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Karena pentingnya keterandalan dan ketepatanwaktuan maka peneliti tertarik untuk meneliti hal apa saja yang dapat mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. Peneliti memilih Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah karena semua laporan keuangan pemerintah Kabupaten Boyolali dibuat dan diolah pada dinas ini, selain itu peneliti juga ingin mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi di Kabupaten Boyolali dapat memenuhi aspek keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Instansi Terkait

Dapat mengetahui seberapa pentingkah pemanfaatan teknologi informasi dan peranan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah

2. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami hubungan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

3. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi para mahasiswa.

4. Bagi Pembaca

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dari penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang membahas mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini, antara lain: pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, keterandalan, ketepatanwaktuan, pelaporan keuangan daerah, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode pengujian instrumen, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian dan analisis data. Pada bab ini akan disajikan dan dijelaskan tentang hasil pengumpulan, analisis data, dan sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan.

BAB V PENUTUP

Mengemukakan kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, serta saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.